



**EVALUASI PERAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DALAM MENDUKUNG PROGRAM STUNTING DAN KETAHANAN
PANGAN DI INDONESIA**

*Evaluation of The Role of The State Budget in Supporting The Stunting and
Food Security Program in Indonesia*

**Muhammad Rizki Smith¹, Inka Nusamuda Pratama^{2*}, Hayatus Silmi³, Lalu
Deri Winardi⁴, Nurwahyuningsih⁵, Marwah⁶, Wahyu Pratama⁷, Nabil Alam⁸,
Ajay Saputra⁹, Lalu Dicky Surya¹⁰, Abdul Aziz Pratama¹¹**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Universitas Muhammadiyah Mataram

*Email: inka.nusamuda@ummat.ac.id

Abstract

Evaluation of the role of the APBN in supporting stunting and food security programs is where the Indonesian government carries out programs to overcome stunting and food security in Indonesia. In implementing the APBN in Indonesia, the Indonesian government always evaluates the APBN in implementing the stunting program in Indonesia, the role of the APBN is very important in preventing stunting and carrying out food security and budget allocation in all related matters, where we must better understand where the APBN evaluation is in related programs, where the government must always carry out adequate efficiency related to the APBN budget which is evaluated annually regarding food security and stunting programs.

Keywords: APBN Evaluation, Stunting Program, Food Security in Indonesia

Abstrak

Evaluasi peran APBN dalam mendukung program stunting dan ketahanan pangan adalah di mana pemerintah indonesia melakukan program dalam mengatasi stunting dan ketahanan pangan di indonesia. Dalam pelaksanaan APBN di indonesia pemerintah indonesia selalu melakukan evaluasi APBN dalam pelaksanaan program stunting di indonesia, peran APBN begitu penting dalam melakukan pencegahan stunting dan melakukan ketahanan pangan dan pengalokasi anggaran dalam semua hal yang terkait, dimana kita harus lebih memahami terkait dimana evaluasi APBN dalam program yang terkait, dimana pemerintah harus selalu melakukan efesiensi yang memamadai terkait anggaran APBN yang setiap tahun di evaluasi terkait ketahanan pangan dan program stunting.

Kata Kunci: Evaluasi APBN, Program Stunting, Ketahanan Pangan di indonesia

PENDAHULUAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif memerlukan pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang sistematis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dan digunakan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Pelaksanaan dan evaluasi kinerja anggaran memungkinkan pemerintah untuk menilai sejauh mana anggaran yang dibelanjakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Pratama & Mutiarin, 2019).

Untuk mengevaluasi kinerja anggaran Anda, Anda perlu menggunakan alat yang tepat untuk mengumpulkan data, menganalisis kinerja, dan mengidentifikasi

area yang perlu ditingkatkan. Beberapa alat yang umum digunakan untuk mengevaluasi kinerja anggaran meliputi: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga dalam hal kesesuaian dengan kinerja pelaksanaan anggaran. Perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan peraturan. Pemantauan dan Evaluasi (Monev): Pemantauan dan evaluasi adalah proses yang melibatkan pengumpulan data berkelanjutan untuk memantau pelaksanaan anggaran dan mengevaluasi dampaknya (Irawan et al., 2023).

Penilaian Kinerja Biro Pemeriksa Keuangan (BPK): Penilaian Kinerja BPK merupakan proses evaluasi independen terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja program pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran telah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar perbaikan pengelolaan keuangan ke depan. Survei Kepuasan Nasional: Survei Kepuasan Nasional merupakan alat untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan program yang dibiayai APBN. Penelitian ini memberikan informasi mengenai efektivitas dan dampak program pemerintah dari sudut pandang pengguna layanan. Hal ini penting dalam mengevaluasi kinerja anggaran (Nisak, 2022).

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berkepanjangan akibat pemberian makanan yang tidak memenuhi kebutuhan gizi. Keterbelakangan pertumbuhan dapat terjadi pada saat janin masih dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Stunting dan gizi buruk lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK pertama tidak hanya memperlambat pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga membahayakan perkembangan kognitif dan menurunkan tingkat kecerdasan anak saat ini serta dampak orang dewasa terhadap produktivitas pada periode tersebut (Suryanto & Kesehatan, 2024).

Stunting mempunyai banyak penyebab, antara lain gizi ibu dan anak yang buruk, kesehatan bayi, ketahanan pangan, lingkungan sosial dan kesehatan, kondisi kehidupan, dan kemiskinan (UNICEF, 2013; WHO, 2013). Gizi buruk berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sejak janin dalam kandungan hingga awal kehidupan bayi (1000 hari pertama kehidupan). Penyebabnya adalah rendahnya asupan vitamin dan mineral, serta rendahnya variasi pangan dan sumber protein hewani. Faktor ibu dan pola asuh orang tua yang tidak tepat, terutama perilaku dan kebiasaan makan anak, juga dapat menyebabkan anak mengalami stunting jika ibu tidak memastikan asupan gizi yang cukup. Jika seorang ibu remaja mengalami kekurangan gizi saat hamil atau menyusui, hal ini dapat berdampak serius pada perkembangan fisik dan otak anak. Faktor lain yang dapat menyebabkan keterbelakangan pertumbuhan antara lain infeksi ibu, kehamilan remaja, penyakit mental ibu, jarak kelahiran yang pendek, dan tekanan darah tinggi. Selain itu, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, seperti akses terhadap sanitasi dan air bersih, merupakan faktor lain yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan anak (Ramadhan & Ahmad, 2024).

Di sisi lain, Strategi Ketahanan Pangan Nasional tidak hanya fokus pada pencapaian swasembada pangan, namun juga bertujuan untuk mencapai

kemandirian dan kedaulatan pangan (angka swasembada pangan), serta daya saing produk pangan nasional ditinjau dari ketahanan pangan. ketahanan nasional juga harus ditekankan. Kita tahu bahwa pangan merupakan aset yang sangat strategis bagi ketahanan nasional. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan indikator penting stabilitas suatu negara. Pengalaman krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1965 dan 1998 merupakan pemicu utama kenaikan harga pangan yang sangat pesat sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat. Situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pada akhirnya menyebabkan keruntuhannya. Dari segi pangan, beberapa bahan pangan Indonesia bisa dikatakan surplus, seperti beras, jagung, ayam, daging sapi, dan susu. Bahkan, kita juga perlu mengimpor pangan lain, seperti kedelai, gula, dan buah-buahan (Rhofita, 2022).

Ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi beberapa kendala serius. Keterbatasan tersebut tidak hanya terkait dengan kapasitas produksi nasional dalam memenuhi kebutuhan pangan, namun juga lemahnya ketahanan permintaan (akibat terlalu tingginya orientasi impor) dan penerapan strategi portofolio yang sistematis dalam kebijakan ketahanan pangan nasional. Perdagangan bebas dan regionalisasi perdagangan seharusnya memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pasar produk pangan produksi dalam negeri, namun yang terjadi justru sebaliknya, barang impor membanjiri pasar dalam negeri Indonesia. Situasi ini harus diatasi melalui Strategi Ketahanan Pangan Nasional (Salasa, 2021).

Peran APBN sangat strategis dalam mengatasi stunting dan meningkatkan ketahanan pangan. Dalam penanganan stunting, APBN mendanai berbagai program kesehatan seperti pemberian tambahan gizi, suplemen zat besi, vitamin A, dan perluasan akses terhadap layanan kesehatan esensial melalui BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, Dana Desa mendukung pendidikan gizi masyarakat lokal serta meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi stunting dengan memastikan nutrisi dan kesehatan yang memadai bagi populasi rentan. Namun, pemantauan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan secara efektif, dan diperlukan koordinasi antar instansi terkait (Putri, 2021).

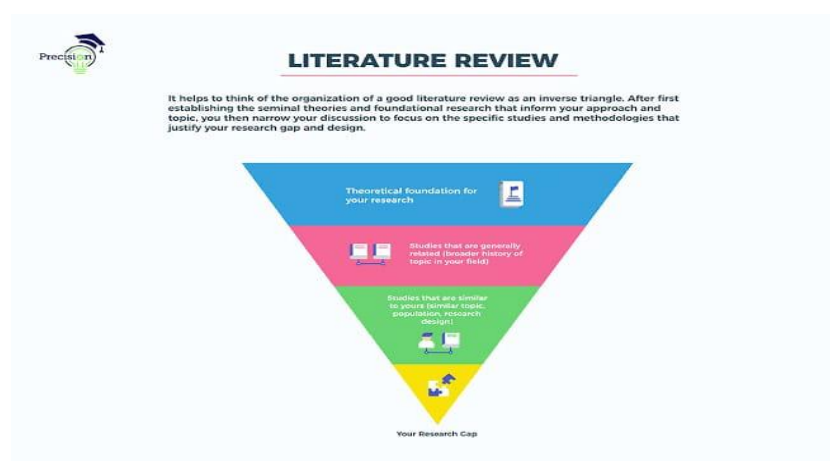
Untuk memperkuat ketahanan pangan, APBN saat ini menyediakan subsidi pangan seperti Program Kartu Sembako dan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang memperkuat daya beli masyarakat miskin. Selain itu, APBN juga mendukung perluasan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalur produksi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen. Investasi juga dilakukan pada inovasi dan teknologi pertanian melalui penelitian benih berkualitas tinggi, pupuk bersubsidi, dan mesin pertanian (machine) untuk meningkatkan produktivitas petani. Program diversifikasi pangan lokal dan penguatan cadangan pangan nasional melalui BULOG juga fokus pada pengurangan ketergantungan pada satu jenis pangan pokok. Namun tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya sinergi antar sektor masih perlu diatasi. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran APBN, memperkuat kolaborasi antarsektor, dan memprioritaskan daerah dengan prevalensi stunting dan kerawanan pangan yang tinggi. Penggunaan teknologi digital juga penting untuk mendukung distribusi bantuan dan pemantauan program berbasis data. Pengelolaan APBN yang baik dapat menurunkan angka stunting dan mencapai

ketahanan pangan nasional (Hasanah et al., 2023).

Mengkaji APBN dari perspektif stunting dan ketahanan pangan, khususnya dampak sosial, merupakan aspek penting untuk memastikan efektivitas kebijakan nasional dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. Melalui evaluasi, pemerintah dapat menilai efisiensi alokasi sumber daya, memantau pencapaian tujuan program, mengidentifikasi tantangan yang ada, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar efektif dan berkontribusi terhadap penurunan stunting, peningkatan akses terhadap pangan bergizi dan menjaga ketahanan gizi masyarakat. Evaluasi yang komprehensif juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memastikan bahwa program menjangkau kelompok masyarakat yang kurang beruntung, sehingga berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Azhar et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sistematis untuk menganalisis temuan terkait evaluasi peran APBN dalam mendukung program stunting dan ketahanan pangan. Pertanyaan survei yang digunakan adalah Peran apa yang dimainkan APBN dalam penilaian penanganan stunting dan ketahanan pangan? Kriteria inklusi meliputi artikel dari jurnal ilmiah ternama seperti Scopus, Web of Science, dan Sinta. Diterbitkan dalam bahasa Inggris atau Indonesia antara tahun 2019 hingga 2024, membahas tentang peran pemerintah dalam evaluasi dan penggunaan APBN dalam program stunting dan ketahanan pangan. Penjelasan metode penelitian sistem tinjauan pustaka. Kriteria eksklusi meliputi publikasi non-ilmiah, makalah tanpa akses penuh, makalah yang tidak terkait dengan pertanyaan penelitian atau dengan metodologi yang tidak jelas. Penelusuran dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan menggunakan kata kunci sebagai berikut: penilaian APBN, pencegahan stunting, ketahanan pangan, dan strategi pemerintah untuk mengatasi dan melaksanakan permasalahan terkait (Cahyono et al., 2019).



Gambar 1: bentuk sistem literature review

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tinjauan literatur sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis literatur terkait evaluasi peran APBN dalam mendukung program stunting dan ketahanan

pangan di Indonesia. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi sumber data dari jurnal akademis, laporan pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian, dokumen APBN, serta laporan dari organisasi internasional seperti WHO, FAO, dan UNICEF. Sebagai kerangka evaluasi, penelitian ini mengkaji alokasi anggaran APBN (input), pelaksanaan program stunting dan ketahanan pangan (output), serta dampaknya terhadap prevalensi stunting dan ketahanan pangan masyarakat (outcome) (Cahyono et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran APBN dalam mendukung program stunting dan ketahanan pangan sangat penting dan mencakup berbagai aspek. Terkait pendanaan program stunting, APBN mengalokasikan anggaran untuk kampanye gizi, penyediaan makanan tambahan, dan layanan kesehatan ibu dan anak. Evaluasi diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat ke daerah-daerah dengan tingkat stunting yang tinggi dan efektivitas intervensi seperti peningkatan akses terhadap sanitasi, pendidikan gizi, dan penyediaan suplemen gizi. Untuk mendukung ketahanan pangan, APBN berkontribusi melalui subsidi pangan seperti pupuk dan benih, pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan fasilitas penyimpanan, serta pengembangan teknologi pertanian. Evaluasi harus menilai sejauh mana kebijakan meningkatkan hasil panen, stabilitas harga bahan pokok, dan daya beli masyarakat (Pratama & Mutiarin, 2019).

Selain itu, sinergi program antara kementerian dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan koordinasi dan efektivitas program yang tepat. Dana APBN yang digunakan untuk program lintas sektoral, seperti integrasi Kementerian Kesehatan, Pertanian, dan Sosial, harus didukung oleh kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah agar berdampak lebih luas. Di sisi lain, pemantauan dan evaluasi program juga harus dipertimbangkan, termasuk transparansi dalam penggunaan sumber daya anggaran dan pelaporan hasilnya. Untuk memastikan keberlanjutan, dampak jangka panjang program ini terhadap kualitas tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat harus dianalisis. Oleh karena itu, peran APBN dapat dioptimalkan melalui efisiensi penggunaan dana untuk mencapai tujuan nasional dan memperkuat koordinasi lintas sektoral dan keberlanjutan program (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Program Stunting

Stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis merupakan salah satu tantangan besar di sektor kesehatan kritis dan salah satu tantangan besar dalam sistem kesehatan Indonesia. Pemerintah berperan strategis dalam mendukung program stunting melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artikel ini memberikan gambaran konkrit bagaimana APBN mendukung program ini, tantangan apa saja yang perlu diatasi, dan upaya optimalisasi apa yang akan dilakukan ke depan (Truna et al., 2024).

1. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Stunting

APBN mendanai serangkaian intervensi spesifik dan sensitif untuk memerangi stunting. Intervensi khusus meliputi: Program suplementasi gizi prenatal (PMT), imunisasi, pemberian vitamin A dan suplemen zat besi. Program ini ditujukan langsung untuk mencegah dan mengatasi stunting pada anak. Intervensi yang Disengaja: Termasuk pengembangan akses terhadap air bersih,

sanitasi yang memadai, dan pendidikan kesehatan masyarakat. Program ini secara tidak langsung mendukung kesehatan keluarga dan mencegah risiko stunting. Pemerintah memastikan anggaran sampai ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan primer seperti Posyandu dan membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Rahayuwati et al., 2023).

2. Koordinasi Antarlembaga untuk Efektivitas Program

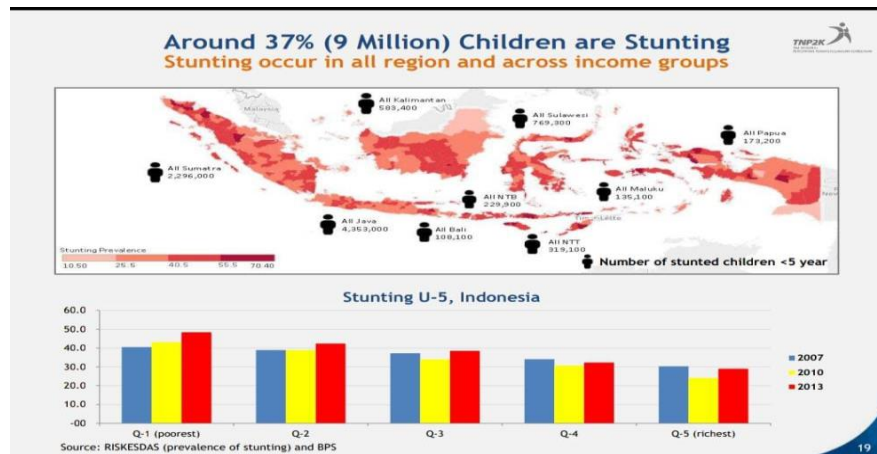
Penanggulangan stunting memerlukan pendekatan multidisiplin. APBN mendukung berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat, khususnya Kementerian Kesehatan, yang bertanggung jawab atas intervensi spesifik seperti program vaksinasi, pemberian PMT, dan pemantauan gizi ibu hamil. Dukungan bagi masyarakat miskin. Kami melayani masyarakat melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Sinergi ini bertujuan untuk memastikan penanganan stunting menyeluruh, meliputi kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan komunitas (Putri, 2021). Gambar 1.1: mengilustrasikan konsep koordinasi antar masing-masing Lembaga.



Gambar 2: Siklus Kinerja dan Akuntabilitas pemantauan dan evaluasi

3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun alokasi APBN untuk stunting pertumbuhan sangat besar, namun efektivitasnya seringkali terhambat oleh beberapa tantangan penyerapan anggaran. Implementasi anggaran di beberapa daerah masih kurang optimal karena kendala birokrasi dan perencanaan yang tidak memadai. Koordinasi yang tidak efektif antar lembaga dan ego sektoral dapat menghambat pelaksanaan program terpadu. Karena keterbatasan geografis, seringkali sulit untuk mengakses layanan kesehatan dan infrastruktur yang memadai di daerah terpencil (Truna et al., 2024).

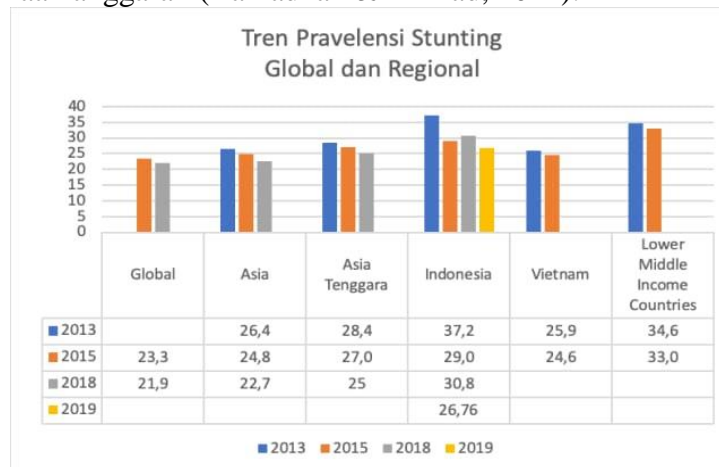


Gambar 3: Persebaran Stunting Di setiap Provinsi

Gambar di atas menunjukkan bahwa data sebaran stunting di seluruh provinsi di Indonesia dan ketimpangan antar provinsi. Inilah peran APBN dalam mengatasi persoalan kritis tersebut.

4. Dampak APBN terhadap Penurunan Stunting

Pemerintah melaporkan prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan alokasi APBN memang berdampak. Namun untuk mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 memerlukan upaya yang lebih fokus dan optimalisasi penggunaan anggaran (Ramadhan & Ahmad, 2024).



Gambar 4: perbandingan tren pravelensi antara indonesia dan negara berkembang serta global.

Data di atas merupakan perbandingan angka stunting di Indonesia dan rata-rata angka stunting dunia dengan negara-negara berpendapatan menengah, dan menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya (Ibrahim & Pratama, 2024).

5. Rekomendasi untuk Optimalisasi APBN

Beberapa langkah dapat diambil untuk membantu APBN mendukung program stunting mereka secara lebih efektif. Perencanaan dan alokasi anggaran berbasis data harus didasarkan pada data prevalensi stunting lokal agar lebih tepat sasaran. Pemantauan dan evaluasi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan

anggaran harus ditingkatkan melalui evaluasi berkala. Meningkatkan pendidikan masyarakat: Kampanye kesehatan yang didanai pemerintah harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah stunting. Memperkuat kolaborasi antarsektoral: Untuk mencapai hasil yang lebih efektif, sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat (Isnanto et al., 2021).



Gambar 5: Konsep Implementasi APBN Dalam Pencegahan Stunting

Dari seluruh poin dan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa APBN mempunyai peran strategis dalam mendukung program penanganan stunting dengan mengalokasikan dana untuk berbagai intervensi dan sinergi antarlembaga. Meskipun terdapat dampak positif, tantangan implementasi masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan penurunan stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Dengan mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan koordinasi, pemerintah dapat mempercepat upaya penurunan stunting secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas generasi mendatang (Hastuti & Dulame, 2024).

Evaluasi Program Ketahanan Pangan

Peran APBN dalam mendukung ketahanan pangan mencakup beberapa aspek penting, mulai dari subsidi hingga pembangunan infrastruktur. Subsidi pangan seperti pupuk dan benih merupakan salah satu bentuk intervensi APBN untuk mendukung produksi pangan nasional dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, dana APBN juga akan digunakan untuk perluasan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan desa, dan gudang pangan untuk meningkatkan hasil panen petani dan memperkuat rantai distribusi pangan. APBN juga mendukung pengembangan inovasi dan teknologi pertanian melalui alokasi dana penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian (Suwarno, 2024).

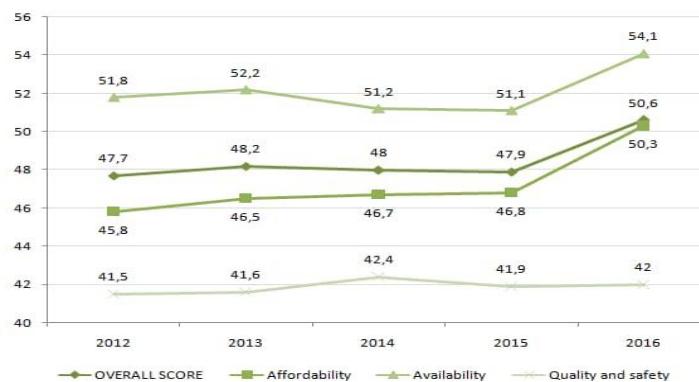
Menilai peran APBN penting untuk memastikan bahwa program yang didanai dapat secara efektif meningkatkan ketahanan pangan. Meskipun subsidi dan infrastruktur mempunyai dampak nyata terhadap peningkatan hasil panen dan kesejahteraan petani, hasil penelitian dan inovasi harus diterapkan secara luas dalam praktik. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting untuk menjamin keberhasilan program ini. Jika dikelola dengan baik, APBN dapat berperan penting dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat (Suwarno, 2024).



Sumber: Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI, 2013

Gambar 6: Peta Ketahanan Pangan Di Setiap Provinsi Di Indonesia

Berdasarkan data Lembaga Ketahanan Pangan Nasional tahun 2013, Peta Ketahanan Pangan Nasional di atas menunjukkan adanya perbedaan yang sangat besar antar provinsi, di Indonesia, intensitas gizi antar provinsi berbeda-beda, bahkan dalam satu wilayah yang sama perbedaan. Papua adalah negara terluas dan menerima curah hujan terbanyak, namun ketahanan pangannya sangat lemah, tidak seperti Jawa, Bali, dan NTB yang ketahanan pangannya jauh lebih tinggi. (Aisyah & Pratama, 2023).



Gambar 7: gambar menunjukkan skor index ketahanan pangan indonesia dan perbandingan rata rata ketahanan pangan global.

Kualitas ketahanan pangan di Indonesia semakin menurun. Berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) yang dirilis Economist Intelligence Unit, peringkat ketahanan pangan Indonesia turun ke peringkat 76 dari 113 negara pada tahun 2014 dan 2015, (Fadila. M.A & Putri, 2023).

Namun, perbaikan pertama mulai terlihat pada tahun 2016. Berdasarkan data terbaru GSFI yang dirilis pada 9 Juni 2016, ketahanan pangan Indonesia saat ini berada pada peringkat 71 dari 113 negara yang dipantau. Meskipun Indonesia masih berada pada kategori bawah, namun sudah meningkat signifikan dibandingkan peringkat tahun 2015. Secara keseluruhan, ketahanan pangan Indonesia dinilai 50,6, naik dari 47,9 pada tahun lalu. Peningkatan nilai ini didukung oleh tiga dimensi: keterjangkauan, ketersediaan, kualitas dan keamanan. Dalam hal keterjangkauan, Indonesia mendapat skor 50,3 pada tahun 2016, naik dari 46,8 pada tahun sebelumnya. Ketersediaan juga meningkat dari 51,2 menjadi 54,1. Sedangkan kualitas dan keamanan sedikit meningkat dari 41,9 menjadi 42, (Fadila. M.A & Putri, 2023).

Berdasarkan data terkait, beberapa cara untuk mengatasi tantangan ketahanan

pangan antara lain dengan memberikan subsidi pangan sebagai bentuk dukungan APBN untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Bantuan seperti subsidi pupuk dan benih ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Langkah ini tidak hanya membantu petani mengurangi biaya produksi, namun juga memungkinkan mereka menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat luas. Pembangunan infrastruktur pertanian dengan menggunakan anggaran APBN juga berperan dalam pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan desa, dan fasilitas penyimpanan pangan. Tujuan dari infrastruktur ini adalah untuk meningkatkan hasil panen, memperkuat sistem distribusi pangan, dan mengurangi kerugian pasca panen. Dengan infrastruktur yang tepat, petani dapat lebih mudah mengakses pasar dan memelihara tanaman mereka dengan baik. Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk mendukung pengembangan teknologi pertanian. Inovasi seperti benih berkualitas, teknik irigasi hemat air, dan mesin pertanian modern ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor pertanian. Hasil penelitian penting untuk dipraktikkan sehingga petani dapat merasakan langsung dampaknya. Efektivitas dan Evaluasi Evaluasi terhadap program-program yang didanai APBN sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Subsidi, infrastruktur, dan inovasi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan hasil panen, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan lokal. Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan program ini. Keberlanjutan program ketahanan pangan. Jika dikelola dengan baik, APBN dapat berperan strategis dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan. Dukungan ini sangat penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini, tetapi juga untuk menjamin akses pangan bagi generasi mendatang dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia (Rhofita, 2022).

Tabel 4. Peta Tentang Persentase Luas Lahan Pertanian, Lahan Kritis dan Luas Tutupan Hutan Terhadap Luas Daratan (Studi tahun 2013)

No.	Provinsi	Lahan Pertanian	Lahan Kritis	Tutupan Hutan
1	Aceh	23,77	0,78	43,74
2	Sumatera Utara	29,95	71,51	51,28
3	Sumatera Barat	9,99	0,87	66,53
4	Riau	68,30	13,79	4,56
5	Jambi	38,72	43,98	43,45
6	Sumatera Selatan	65,89	50,63	6,94
7	Bengkulu	67,30	71,19	12,65
8	Lampung	36,87	40,24	29,02
9	Kepulauan Bangka Belitung	30,32	40,92	9,54
10	Kepulauan Riau	41,46	-	7,01
11	Dki Jakarta	1,27	0	0
12	Jawa Barat	39,52	17,21	16,71
13	Jawa Tengah	55,46	41	25,7
14	Banten	65,43	10,77	21,54
15	Jawa Timur	28,91	10,28	6,58
16	D.I. Yogyakarta	70,81	10,53	24,66
17	Bali	58,43	2,96	23,19
18	Nusa Tenggara Barat	49,14	25,01	57,57
19	Nusa Tenggara Timur	37,12	90,15	15,01
20	Kalimantan Barat	15,72	8,64	45,32
21	Kalimantan Tengah	38,78	40,24	59,66
22	Kalimantan Selatan	44,44	19,64	41,64
23	Kalimantan Timur	12,60	32,26	13,87
24	Sulawesi Utara	6,30	52,56	24,65
25	Sulawesi Tengah	15,06	3,24	67,38
26	Sulawesi Selatan	9,92	7,92	34,76
27	Sulawesi Tenggara	6,16	73,69	47,91
28	Gorontalo	32,57	8,04	69,03
29	Sulawesi Barat	52,84	17,16	27,59
30	Maluku	48,11	35,94	38,57
31	Maluku Utara	10,49	22,42	88,27
32	Papua	2,45	9,16	78,77
33	Papua Barat	2,76	4,25	87,83
		33,9	40,72	28,65

Sumber: Laboratorium Ketahanan Nasional yang diolah

Gambar 6: Persentasi Dan Luas Kekuatan Pangan Setiap Provinsi Di Seluruh Indonesia

Dari gambar di atas terlihat bahwa luas wilayah tidak mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah ini, jadi bisa dilihat dari semua aspek. APBN memainkan peran penting dalam mendukung program stunting dan ketahanan pangan dengan mendanai berbagai intervensi penting. Dalam upaya memerangi stunting, dana akan digunakan untuk program peningkatan gizi, suplementasi gizi, serta layanan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka stunting di daerah yang tinggi stunting. Sementara di bidang ketahanan pangan, APBN mendukung subsidi pangan, pembangunan infrastruktur pertanian, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produksi dan distribusi pangan. Evaluasi program diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan untuk memperkuat kolaborasi antar Lembaga yang berpartisipasi. Jika dikelola dengan baik, APBN dapat membantu mencapai ketahanan pangan berkelanjutan dan mengurangi stunting secara signifikan (Amalia et al., 2022).

Implementasi kebijakan yang menilai peran APBN dalam mendukung program stunting dan ketahanan pangan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, dan sistem pemantauan dan evaluasi yang kurang optimal merupakan kendala struktural. Faktor kontekstual seperti perbedaan geografis, akses terjangkau terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan ketahanan pangan juga berperan. Tantangan politik seperti perubahan prioritas anggaran dan lemahnya akuntabilitas menambah kompleksitas. Interaksi antara faktor-faktor ini memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan fokus pada peningkatan kapasitas, peningkatan akses, dan pendidikan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal (Pratama et al., 2023).

KESIMPULAN

APBN berperan penting dalam mendukung program penurunan stunting dan ketahanan pangan dengan mengalokasikan sumber daya ke berbagai bidang terkait. Pembiayaan yang memadai dan efisien serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan menjamin keberhasilan program ini dalam meningkatkan gizi daerah, meningkatkan produksi pangan dan menjaga ketahanan pangan nasional. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan mempunyai dampak optimal, sehingga mencapai tujuan jangka panjang yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dan ketahanan pangan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga penelitian dan pemangku kepentingan yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian artikel ini. Semoga artikel ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, menambah wawasan dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, & Pratama, I. N. (2023). Kebijakan Strategis Dalam Merancang Dan Membangun Konsep Smart City Yang Berkelanjutan. *Journal of Enviromental Policy and Technology*, 1(2), 85–86.



- <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jeptec/index>
- Amalia, T. A., Adibrata, J. A., & Setiawan, R. R. (2022). Strategi Ketahanan Pangan Dimasa Pandemi Covid-19: Penguatan Potensi Desa Melalui Sustainable Farming di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 129–140. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>
- Azhar, A. L., Suliyanto, S., Chamidah, N., Ana, E., & Amelia, D. (2023). Pemodelan Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Regresi Logistik Ordinal Data Panel Efek Acak. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 166. <https://doi.org/10.22146/jkn.86511>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Fadila, M.A., & Putri, N. . (2023). Analysis of Food Security Development in Indonesia : A Big Data and Data Mining Approach. *Seminar Nasional Official Statistics* , 2022, 1–10.
- Hasanah, S., Pratama, I. N., & Kurniawan, C. (2023). Digital government in social sciences discipline: mapping pivotal features and proposed theoretical model. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 195–220.
- Hastuti, W., & Dulame, I. M. (2024). Penyuluhan Masalah Stunting Terkait Pencegahan Masalah Dan Masa Depan Indonesia. *Jurnal Abdi Citra*, 1(2), 130–136. <https://doi.org/10.62237/jac.v1i2.151>
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Ibrahim, I., & Pratama, I. N. (2024). Impresi Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 1–14.
- Irawan, M. F., Putra, M. A. R., Azhari, M. M., & Pratama, I. N. (2023). Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bmkg Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas Iii Ternate. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 119–128.
- Isnanto, A., Istiqomah, I., & Suharno, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 832. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1436>
- Nisak, K. (2022). Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 57–72. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199>
- Pratama, I. N., Darmansyah, & Subandi, A. (2023). Seminar Nasional LPPM UMMAT Transformasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Mataram. *LPPM UMMAT (Universitas Muhammadiyah Mataram)*, 2(April), 1–13.
- Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). Formulasi Kebijakan Tax Amnesty Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1), 29–48. <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.15>
- Putri, S. Y. (2021). Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 5(2), 163. <https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.163-174>
- Rahayuwati, L., Yani, D. I., Setiawan, A. S., & Oruga, M. D. (2023).



- Transdisciplinary Approach to Prevent Stunting in Indonesia. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 11(2), 77–81. <https://doi.org/10.24198/jkp.v11i2.2295>
- Ramadhan, D. A. P., & Ahmad, M. J. (2024). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Permasalahan Anak Stunting Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 14–26. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1650/1532>
- Aisyah, & Pratama, I. N. (2023). Kebijakan Strategis Dalam Merancang Dan Membangun Konsep Smart City Yang Berkelanjutan. *Journal of Enviromental Policy and Technology*, 1(2), 85–86. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jeptec/index>
- Amalia, T. A., Adibrata, J. A., & Setiawan, R. R. (2022). Strategi Ketahanan Pangan Dimasa Pandemi Covid-19: Penguatan Potensi Desa Melalui Sustainable Farming di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 129–140. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsep>
- Azhar, A. L., Suliyanto, S., Chamidah, N., Ana, E., & Amelia, D. (2023). Pemodelan Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Regresi Logistik Ordinal Data Panel Efek Acak. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 166. <https://doi.org/10.22146/jkn.86511>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Fadila. M.A., & Putri, N. . (2023). Analysis of Food Security Development in Indonesia : A Big Data and Data Mining Approach. *Seminar Nasional Official Statistics* , 2022, 1–10.
- Hasanah, S., Pratama, I. N., & Kurniawan, C. (2023). Digital government in social sciences discipline: mapping pivotal features and proposed theoretical model. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(1), 195–220.
- Hastuti, W., & Dulame, I. M. (2024). Penyuluhan Masalah Stunting Terkait Pencegahan Masalah Dan Masa Depan Indonesia. *Jurnal Abdi Citra*, 1(2), 130–136. <https://doi.org/10.62237/jac.v1i2.151>
- Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>
- Ibrahim, I., & Pratama, I. N. (2024). Impresi Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 5(1), 1–14.
- Irawan, M. F., Putra, M. A. R., Azhari, M. M., & Pratama, I. N. (2023). Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bmkg Provinsi Maluku Utara Stasiun Geofisika Klas Iii Ternate. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 119–128.
- Isnanto, A., Istiqomah, I., & Suharno, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 832. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1436>
- Nisak, K. (2022). Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan APBN di Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 57–72. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4199>
- Pratama, I. N., Darmansyah, & Subandi, A. (2023). Seminar Nasional LPPM UMMAT Transformasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas



- Pelayanan Publik di Kota Mataram. *LPPM UMMAT (Universitas Muhammadiyah Mataram)*, 2(April), 1–13.
- Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). Formulasi Kebijakan Tax Amnesty Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, 1(1), 29–48. <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i1.15>
- Putri, S. Y. (2021). Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 5(2), 163. <https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.163-174>
- Rahayuwati, L., Yani, D. I., Setiawan, A. S., & Oruga, M. D. (2023). Transdisciplinary Approach to Prevent Stunting in Indonesia. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 11(2), 77–81. <https://doi.org/10.24198/jkp.v11i2.2295>
- Ramadhan, D. A. P., & Ahmad, M. J. (2024). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Permasalahan Anak Stunting Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 14–26. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1650/1532>
- Rhofita, E. I. R. (2022). Optimalisasi Sumber Daya Pertanian Indonesia untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan dan Energi Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 82. <https://doi.org/10.22146/jkn.71642>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Suryanto, G. I., & Kesehatan, D. (2024). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 Dampak Stunting. *Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan ...*, November, 1–32. https://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis_2018/Sesi_1_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf
- Suwarno, R. N. (2024). Strategi Ketahanan Pangan dari Basis Lokal: Integrasi Prinsip Permakultur dalam. *Indonesian Journal of Applied Science and Technology*, 5(2), 52–66.
- Truna, L. P., Ginting, A. N. R., Sumaryadi, M. H., Alhaq, R. T., Fienaurisilmi, Hibatullah, W. F. A., & Afifah, D. F. (2024). Implementasi kebijakan penanganan stunting di Indonesia dan Filipina. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 448–457.

